

777 Domain Entitas Diblokir, Bappebti Tutup Akses Situs-situs Yang Tidak Memiliki Izin

Tanggal : Senin , 28 September 2020
Media : Tribunjabar.com
Halaman : 1
Wartawan : Istimewa
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
Rubrik : tribun biz
Topik : Blokir Domain Entitas Ilegal

777 Domain Entitas Diblokir, Bappebti Tutup Akses Situs-situs yang Tidak Memiliki Izin



TIRUWALAU, BANGKALU, BANGKALU: Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 777 domain entitas yang tidak memiliki izin.

Selama sampai dengan bulan Agustus 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 777 domain entitas.

Pemblokiran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Bappebti secara rutin melakukan pemblokiran sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam Tribun dari siaran pers Kemendag, Senin (28/9/2020).

WALUKA:
• *Peserta Jambore Muta Lembang Tengah Jajati Ekspor Sapan Mayor ke Singapura*

Sidharta menegaskan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Bappebti terus melakukan pemblokiran bagi situs-situs yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Meskipun banyak pihak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, wajib memiliki perizinan dari Bappebti.

"Kami akan terus melakukan pemblokiran agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat diakses oleh warga negara Indonesia. Hal ini untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka," ujarnya.

Selain maraknya penawaran investasi berkedok forex dan kegiatan usaha sebagai pinjol, Bappebti juga mengawasi adanya kegiatan usaha lain di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

WALUKA:
• *Pengusaha Mula Mula Berdagang Berjangka Pasak dan Substansi Gaji Karyawan Agar Jangan Ada yang Di PHK*

Dalam kegiatan usaha tersebut, pelaku usaha memberikan nasihat atau rekomendasi dalam mengambil posisi jual atau beli kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya.

Faktanya, selama ini belum ada operasional pemberian perizinan sebagai penasihat berjangka.

"Terdapat lembaga lembaga yang memberikan nasihat dalam bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Namun, selama ini kegiatan usaha sebagai penasihat berjangka dan wali penasihat berjangka belum memiliki operasional yang jelas. Selama ini, fungsi pemberian nasihat untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi tersebut dilaksanakan oleh pinjol berjangka berizin," jelas Sidharta.

Untuk itu, lanjut Sidharta, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wali Penasihat Berjangka.

WALUKA:
• *Kontribusi Konsumsi Perikanan Makin Bertambah, 1,3 Juta Penguasa Mula Toranum Dikembangkan*

Peraturan ini ditetapkan pada 30 Juni 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

"Peraturan tersebut diterbitkan untuk mengatur dan memberikan perizinan terhadap kegiatan usaha yang memberikan nasihat atau rekomendasi untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi," jelas Sidharta.

Berdasarkan peraturan ini, penasihat berjangka didefinisikan sebagai orang perorangan atau badan usaha yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan.

Sementara itu, nasihat adalah suatu penyampaian informasi ataupun rekomendasi terkait dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

WALUKA:
• *Eks Lab Awan Pita di Bandung Jadi Tempat Produksi Vaksin Covid-19? Kita Menyoal*

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Perizinan Bappebti, M. Syist mengimbau kepada para pelaku usaha yang mencukupi pemberian nasihat terkait jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya, dan/atau kontrak derivatif lainnya agar segera menguraikan perizinan tersebut dahulu sebagai penasihat berjangka dan/atau wali penasihat berjangka ke Bappebti sebelum melakukan kegiatan usahanya.

"Bappebti akan menindak tegas setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penasihat berjangka dan/atau wali penasihat berjangka namun tidak memiliki perizinan dari Bappebti," tegas M. Syist.